



# Why Privacy Matter in Handling Pandemic COVID-19?

Lintang Setianti

Human right researcher at @elsamnews

# Surveillance Before After Covid 19

## **Over the Skin Surveillance:**

**- CCTV, Camera, GPS, Mobile Location Data, Passenger Name Record**

## **New Normal Surveillance**

- **“Under the Skin” Surveillance like temperature checks, immunity, certificate passports, thermal facial recognition, contact tracing**



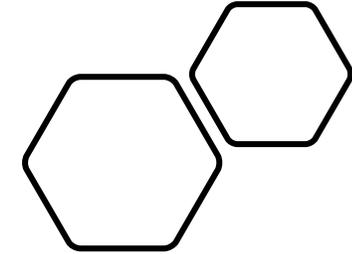
## Membantu Pelacakan untuk Menghentikan Penyebaran COVID-19

Dengan mengaktifkan akses bluetooth, Anda akan membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).



## Notifikasi Zona Merah

Dengan mengaktifkan akses lokasi, Anda akan mendapat notifikasi melalui aplikasi PeduliLindungi jika Anda memasuki zona merah. Zona merah adalah area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan. Selanjutnya jika Anda tetap berada di zona merah tersebut selama 30 menit, PeduliLindungi juga akan memberikan pengingat untuk segera menyelesaikan urusan Anda.



- The purpose of this app is to give user a notification if they are in the Red Zone Area or in Crowd Area
- To help tracing to prevent the transmission

## PeduliLindungi memerlukan persetujuan Anda untuk:

- 1 Menyimpan data nomor handphone Anda dalam format yang terenkripsi.
- 2 Mengakses bluetooth Anda.
- 3 Mengakses data lokasi Anda.

Hal ini diperlukan agar PeduliLindungi dapat memberi notifikasi jika Anda memasuki **Zona Merah** atau sedang berada di keramaian.

Data nomor handphone Anda akan membantu instansi pemerintah terkait untuk mengidentifikasi dan menghubungi Anda jika ditemukan adanya riwayat kontak dengan seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

**SAYA SETUJU**

## PeduliLindungi App permissions

Version 2.0.0 may request access to

-  **Camera**
  - take photos and videos
-  **Location**
  - access precise location (GPS and network-based)
  - access approximate location (network-based)
-  **Storage**
  - modify or delete the contents of your memory card
  - read the contents of your memory card
-  **Other**
  - run foreground service
  - Bluetooth administration
  - run at startup
  - full network access
  - view network connections

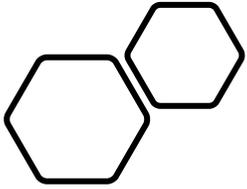
You can disable access for these permissions in Settings. Updates to PeduliLindungi may automatically add additional capabilities within each group.

- The purpose of phone number data collection is to help government agencies to identify or contact us if they found there is a history record, we had contact with confirm case

# Data and Technology in Handling The Pandemic

- The use of technology in time of crisis like this pandemic is not new
  - Terrorism attack, disaster, or other big events in national level increase the government desire to improve their surveillance capacity
- Contact Tracing is will more effective during the early phase of handling the pandemic
- To track the allocation of health resources effectively
- Various government has surveillance method technology based
  - In Taiwan "Electronic Fence"
  - In Singapore as well as Indonesia launch TraceTogether or Peduli Lindungi
  - China : categorize citizen based on coloring status in order to get access to having activities outside or should do quarantine





Question :  
The Effectiveness and  
Privacy Violations?

# BIG DATA INSTITUTE

Li Ka Shing Centre for Health Information and Discovery

[Site Map](#) [Accessibility](#) [Cookies](#) [Contact us](#) [Log in](#)  
[Intranet](#)



[HOME](#) [ABOUT US](#) [RESEARCH](#) [NEWS](#) [EVENTS](#) [STUDY](#) [TEAM](#) [PUBLICATIONS](#) [MORE...](#)

Search 

[Home](#) / [News](#) / Digital contact tracing can slow or even stop coronavirus transmission and ease us out of lockdown

## Digital contact tracing can slow or even stop coronavirus transmission and ease us out of lockdown

[Share](#) [Share](#)

The Effectiveness:

- > 60% citizen should use this app
- > Need to be supported by adequate health infrastructure





## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

**30**  
REGULASI YANG MEMUAT  
UNSUR PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI  
YANG BELUM MEMILIKI  
STANDAR HAM

### REGULASI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

#### Pasal 17 Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik

(1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.\*

#### Komentar Umum Nomor 16 Tentang Pasal 17 Hak Atas Privasi

Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badanbadan, harus diatur oleh hukum.

### OECD GUIDELINES ON THE PROTECTION OF PRIVACY AND TRANS- BORDER FLOWS OF PERSONAL DATA

- Prinsip pembatasan
- Prinsip limitasi penggunaan data pribadi
- Prinsip keterbukaan
- Prinsip tujuan khusus penggunaan data pribadi
- Prinsip partisipasi
- Prinsip kualitas data pribadi
- Prinsip perlindungan keamanan
- Prinsip akuntabilitas

### UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR DATA PRIBADI DI INDONESIA

UNDANG-UNDANG	A. PENGOLAHAN DATA				B. PEMBUKAAN DATA			C. AKUNTABILITAS		V. KEARSIPAN DAN KEPENDUDUKAN																	
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	C1	C2	UU Adminduk	UU Kearsipan	VI. KESEHATAN						VII. KEUANGAN DAN PERBANKAN		VIII. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							
<b>I. HAM</b>													UU Praktik Kedokteran	UU Narkotika	UU Kesehatan	UU Rumah Sakit	UU Kesehatan Jiwa	UU Tenaga Kesehatan	UU Perbankan	UU BI	UU Perbankan Syariah	UU TPPU	UU OJK	UU Dokumen Perusahaan	UU PK	UU Perdagangan	
KUHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU HAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU TPPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. MEDIA DAN TELEKOMUNIKASI</b>													UU Telekomunikasi	UU ITE	UU KIP												
UU Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU ITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III. PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>													UU Anti-Terorisme	UU Intelijen Negara	UU Pendanaan Terorisme												
UU Anti-Terorisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU Intelijen Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU Pendanaan Terorisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IV. PERADILAN</b>													KUHAP	UU Tipikor	UU KPK	UU Advokat	UU KY										
KUHAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU Tipikor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU KPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU Advokat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UU KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Keterangan:**  
A1 : Tujuan pengolahan data pribadi  
A2 : Notifikasi atau persetujuan dari pemilik data pribadi  
A3 - Rentan waktu retensi data pribadi  
A4 : Penghancuran, penghapusan atau pengubahan data pribadi  
B1 : Tujuan pembukaan data pribadi kepada pihak ketiga  
B2 : Pemberi izin untuk membuka data pribadi kepada pihak ketiga  
B3 : Jangka waktu data pribadi dapat dibuka kepada pihak ketiga  
C1 : Sanksi bagi pelanggar perlindungan data pribadi  
C2 : Mekanisme pemulihan bagi korban yang hak privasinya

# Privacy and Data Protection

- Because Indonesia has no specific and comprehensive data protection regulation
- There is scepticism from citizen against government in term of using technology to handling pandemic. Based on survey from CISSRec said 81% said privacy protection is urgent in Indonesia
- Based on ELSAM study (2016) there is 32 regulations about data protection in general. 6 of it related to health sector namely Health Law, Hospital Law, Mental Health Law, Medical Practice Law, Medical Personnel Law, and Narcotics Law. Confidentiality of medical record is regulated in Health Ministry Law (PMK) Nom 269/MenKes/III/2008 about Medical Record that obliging all health services providers to maintain the confidentiality of patient' medical records.

# Why Privacy Matters on Handling Pandemic?

- Health Data is part of Sensitive Data, which always become one of reason to discriminate people
- More than that, if data patient is leaked it's not only harmful for the person itself but jeopardize public health efforts in wider level
  - Makes public reluctant to have testing because afraid of being humiliated if the data is leaked



## 17 Prinsip World Health Organization (WHO) dalam Teknologi Pelacakan Berbasis Digital

WHO telah merilis pedoman sementara dalam penggunaan teknologi pelacakan berbasis digital untuk melacak kontak COVID-19. Pedoman ini dimaksudkan untuk mendorong tanggung jawab dan pendekatan berbasis HAM bagi pihak-pihak yang melakukan pengembangan atau penerapan teknologi pelacakan kontak COVID-19. Berikut merupakan pedoman singkat mengenai 17 prinsip yang direkomendasikan:



<b>Batasan Waktu</b> Segala tindakan dalam pelacakan kontak COVID-19 harus bersifat sementara dan memiliki cakupan batasan.	<b>Melakukan Tes dan Evaluasi</b> Teknologi wajib dites dan di evaluasi sebelum digunakan.	<b>Proporsional</b> Pemrosesan data harus dilakukan secara proporsional dan berlandaskan hukum.	
<b>Minimalisasi Data</b> Pemrosesan data harus terbatas pada data yang diperlukan.	<b>Menggunakan Pembatasan</b> Data yang digunakan harus terbatas pada tujuan kesehatan masyarakat.	<b>Kesukarelaan</b> Penggunaan aplikasi dilakukan secara sukarela dan diberitahukan.	
<b>Transparansi dan Kejelasan</b> Pemrosesan data wajib dilakukan secara transparan dan diuraikan secara jelas.	<b>Penyimpanan Data dengan Melindungi Privasi</b> Penyimpanan data wajib dilakukan secara efektif, aman, dan melindungi privasi.	<b>Keamanan</b> Memiliki keamanan tinggi, termasuk enkripsi, wajib dipastikan setiap saat.	
<b>Penyimpanan Terbatas</b> Penyimpanan data hanya boleh dilakukan selama periode respon pandemi.	<b>Melaporkan Infeksi</b> Pelaporan harus dilakukan dengan persetujuan atau melalui pelaporan sendiri.	<b>Pemberitahuan</b> Pemberitahuan kontak wajib dilakukan secara jelas, informatif, mudah diakses, dan melindungi privasi.	<b>Pelacakan Kasus COVID-19</b> Pengguna yang berstatus pasien tidak boleh dilacak sedang dalam pemulihan.
<b>Ketepatan</b> Kualitas data wajib dijaga untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan.	<b>Akuntabilitas</b> Wajib ada mekanisme pengaduan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data.	<b>Pengawasan Independen</b> Wajib ada pengawasan independen terhadap entitas yang terlibat.	<b>Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Publik</b> Harus ada upaya untuk melibatkan berbagai pihak.

# The New Normal is Personal Data Being Protected

## Data Protection Principles on COVID-19 Handling

Transparency

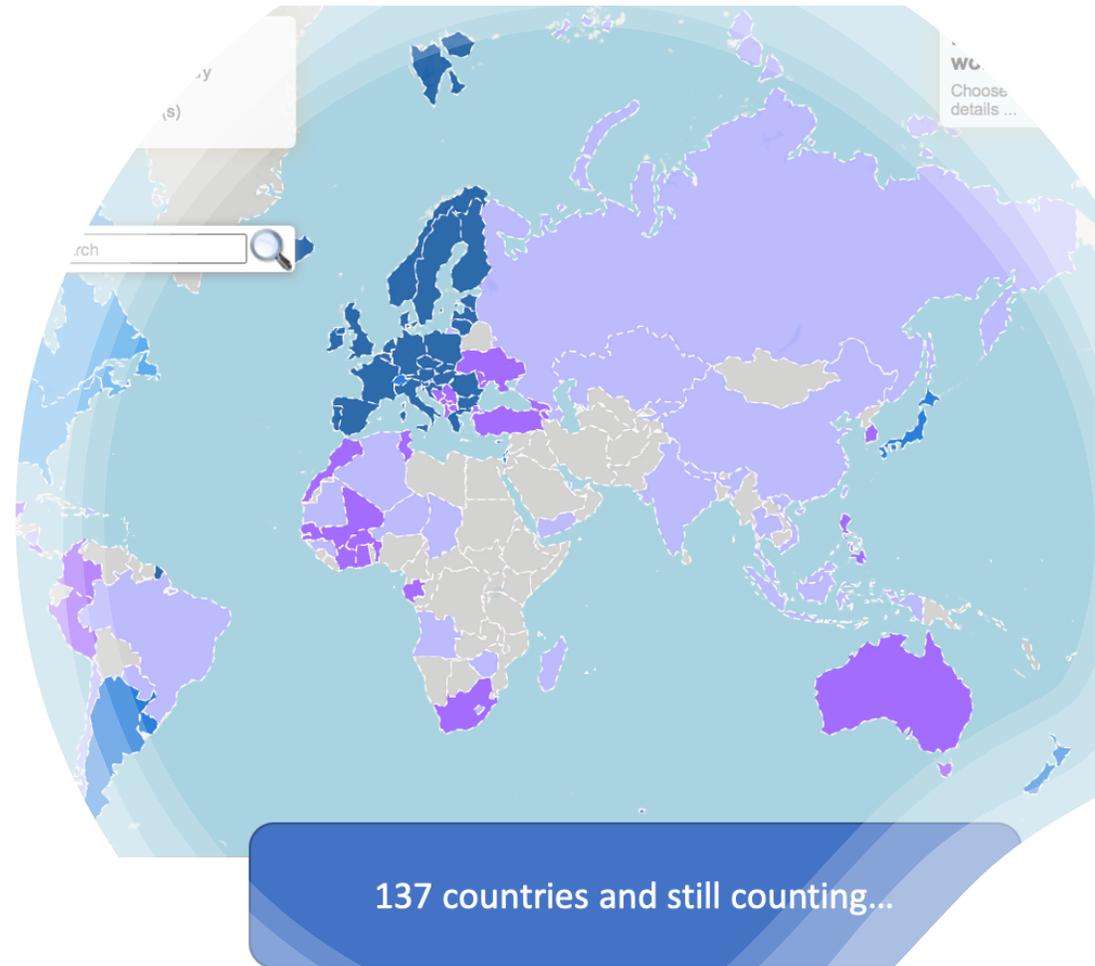
Necessity,  
Proportionality  
and Data  
Minimization

Purpose  
Limitation

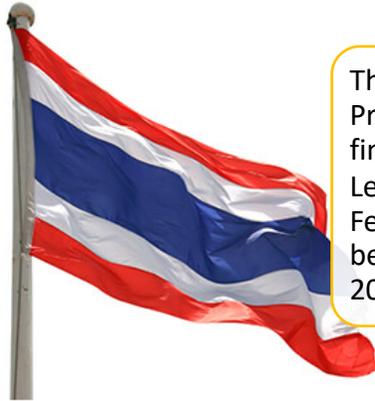
Accountability

Security

Comprehensive  
Personal data  
Protection Regulation  
is required...



## Thailand



Thailand Personal Data Protection Act (PDPA) was finally approved by the National Legislative Assembly on 28 February 2019, and thus has become effective from 27<sup>th</sup> May 2020.

## Malaysia



Malaysia's first comprehensive personal data protection legislation, the Personal Data Protection Act 2010 (PDPA), was passed by the Malaysian Parliament on 2 June 2010 and came into force on 15 November 2013.

## Filipina



The Philippines recently enacted the Data Privacy Act of 2012 (the 'Act') or Republic Act No. 10173, which took effect on 8 September 2012

## Laos



Laos has also endorsed the Electronic Data Protection Law in 2017, which is a comprehensive reference for the protection of personal (electronic) data

## Singapura



Singapore enacted the Personal Data Protection Act 2012 (No. 26 of 2012) ('Act') on 15 October 2012



# Thank You!

[lintang@elsam.or.id](mailto:lintang@elsam.or.id)